

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Promotor dan Ko Promotor	iii
Lembar Pengesahan	iv
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	xi
Summary	xiv
Abstract	xvi
Daftar Isi	xvii
Daftar Perundang-undangan	xx
Daftar Gambar	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	27
3. Manfaat Penelitian	27
4. Kerangka Konseptual	28
4.1. Makna Prinsip Proporsionalitas	28
4.2. Kontrak Pemerintah	32
4.2. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	37
5. Metode Penelitian	43
5.1. Pendekatan Masalah	43
5.2. Bahan Hukum	45
5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	46
5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	47
6. Pertanggungjawaban Sistematika	48
BAB II ASPEK FILOSOFIS DAN PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM TAHAP PEMBENTUKAN	

KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH

PEMERINTAH	49
1. Aspek Filosofis Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	50
2. Keabsahan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	54
3. Pembentukan Kesepakatan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	86
4. Keabsahan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	94
4.1. Isi dan Fungsi Dokumen Lelang	96
4.2. Pelaksanaan Lelang	99
4.3. Penetapan Pemenang Lelang	106
5. Prinsip Proporsionalitas dalam Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	112
6. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik	116
7. Prosedur Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	119
7.1. Sanggah dan Sanggahan Banding	119
7.2. Proses Sanggahan dan Sanggahan Banding	120

**BAB III PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN
JASA OLEH PEMERINTAH**

1. Penentuan Isi Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	128
2. Penormaan Prinsip Proporsionalitas dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	141
3. Prinsip Proporsionalitas dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah	149

BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN	
	BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH	159
1.	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	160
2.	Kerugian Negara sebagai Akibat Hubungan Kontraktual	164
2.1.	Kerugian Negara Ditimbulkan Oleh Kontrak yang Dibuat Secara Sah	165
2.2.	Adanya Wanprestasi	184
2.3.	Kerugian Negara Akibat Adanya Cacat Tersembunyi Dalam Objek Prestasi Yang Diberikan	194
3.	Kerugian Negara yang Bukan Akibat dari Hubungan Kontraktual	198
4.	Tanggung Gugat Penyedia Barang dan Jasa Terhadap Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual	210
5.	Imunitas Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	240
BAB V	PENUTUP	252
1.	Kesimpulan	253
2.	Saran	254

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2958.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4357.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432 *juncto* Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 700.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4655.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4765.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4707.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



DAFTAR SKEMA

Skema 1 Tahapan-Tahapan Terbentuknya Kesepakatan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah

Skema 2 Proses Sanggahan

Skema 3 Proses Sanggahan Banding

Skema 4 Mekanisme Sanggahan dan Sanggahan Banding (Perpres 70 Tahun 2012)

